
**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT BAGI RUMAH TANGGA SASARAN DI KECAMATAN
TANON KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013**

Agus Sudiro¹, Moh. Gamal Rindarjono², Sigit Santoso²
agus_sudiro@gmail.com

Abstract

The objectives of this research are: (1) to investigate the dispersion of poor families in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013; (2) to investigate the dispersion of targeted households receiving temporary direct cash assistance in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013; (3) to investigate the effectiveness of temporary direct cash assistance distribution in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013; (4) to investigate the benefit of temporary direct cash assistance for the targeted households in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013; and (5) to arrange the learning materials of Geography on the basic competency of Analyzing the Dynamics and Problems of Population and Human Resources in Indonesia for Development. This research used the qualitative research method with spatial approach. Its population was all of the targeted households receiving temporary direct cash assistance in Tanon sub-district, Sragen regency. The samples of research were taken by using the proportional random sampling technique and the simple random sampling technique. They consisted of 100 targeted households. The data of research were gathered through field observation, in-depth interview, and documentation.

The results of research are as follows: 1) Of 17,686 households in Tanon sub-district, Sragen regency, 7,793 are poor families. The largest number of poor families, namely: 830 is found in Bonagung village, and the smallest number, that is 279, is found in Suwatu village. 2) Of 7.793 of poor families, 5,588 are the recipients of the temporary direct cash assistance. 3) Through the consideration of 14 criteria of poverty, 37 targeted households are eligible to receive the temporary direct cash assistance, and through the calculation of calorie adequacy, 76 targeted households are eligible to get the temporary direct cash assistance. Thus, the distribution of the temporary direct cash assistance to its recipients in Tanon sub-district, Sragen regency in 2013 is effective with the percentage of 76%. 4) Through the consideration of income, rice price, and life style variables, the targeted households can feel the benefit of the program. The level of benefit in term of income and rice-purchasing ability is 91%, and that of benefit in term of life is 89%. 5) The result of this research is a supporting one to the learning material in Geography for Grade XI, Semester I of the 2013 curriculum on the on the basic competency of Analyzing the Dynamics and Problems of Population and Human Resources in Indonesia for Development.

Keywords: *Poor families, targeted households, effectiveness of temporary direct cash assistance distribution, and benefit*

PENDAHULUAN

Naiknya konsumsi BBM menurut pemerintah disebabkan karena

meningkatnya pembelian kendaraan bermotor yang mencapai 1,2 juta unit, sehingga kebutuhan bahan bakar-pun

*¹ Staff Mengajar STKIP Pontianak

*² Staff Mengajar Magister PKLH FKIP UNS

meningkat hingga 3 juta kiloliter. Penjualan sepeda motor tahun ini mencapai 7,1 juta unit, bertambah 1 juta unit dari tahun sebelumnya (Th. 2012, 7,06 juta unit). Sedangkan penjualan mobil tahun lalu naik 24,83 persen. Produksi mobil tahun ini mencapai 1,29 juta unit, kemudian Akan diekspor 90.000 unit. Jadi di dalam negeri akan ada 1,2 juta unit, bertambah dari perkiraan awal 1,1 juta unit. Karena itu, pemerintah (Melalui Menteri ESDM, Jero Wacik) memastikan bahwa kuota BBM bersubsidi 46,01 juta kiloliter dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 tidak akan mencukupi.

Subsidi merupakan salah satu pos anggaran dalam APBN, yaitu bagian dari pos belanja Pemerintah Indonesia (Data pokok APBN-P 2012 dan APBN Semester I 2013 Depkeu RI). Subsidi yang dimaksud ialah dana dalam APBN yang dipergunakan untuk menurunkan harga barang atau jasa yang dibayar masyarakat, terutama masyarakat miskin. Adapun barang-barang dan jasa-jasa yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia yang termuat dalam APBN ialah (Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN-P 2012 dan APBN SEMESTER I 2013):BBM (Bahan Bakar Minyak), Listrik, Pangan, Pupuk, Benih, PSO, Kredit program, Subsidi pajak. Dari berbagai barang dan jasa di atas, BBM

merupakan komoditi yang mendapat alokasi subsidi yang paling besar.

Dampak kenaikan BBM dalam negeri memang dirasakan oleh semua masyarakat. Masyarakat miskin dengan penghasilan rendah yang paling merasakan dampak tersebut. Namun demikian pemerintah bertekad untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama masyarakat miskin melalui program kompensasi, yang berupa :

- 1) Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp12,5 triliun. Program ini terdiri dari Raskin sebesar Rp 4,3 triliun, Beasiswa Bidik Misi Rp 7,5 triliun dan Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 0,7 triliun.
- 2) Program BLSM sebesar Rp11,6 Triliun.
- 3) Tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti irigasi dan air bersih sebesar Rp. 6 Triliun.

Program pemerintah yang digulirkan untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat salah satunya adalah pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLSM sendiri dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang rentan terkena dampak secara langsung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar daya beli

masyarakat tidak menurun saat harga-harga barang naik sebagai imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. BLSM diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebesar Rp 150.000 per bulan selama 5 bulan. BLSM merupakan program kompensasi jangka pendek akibat kenaikan harga BBM. Program BLSM ini bertujuan untuk:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (KEMENSOS;2013)

Rumah tangga sasaran(RTS) penerima bantuan BLSM adalah sebanyak 15,5 Juta keluarga hasil BPS (PPLS 2011), yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.

Kabupaten Sragen termasuk ke dalam salah satu kabupaten yang terbebani atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kabupaten Sragen terdapat 69.420 RTS tersebar di 16 Kecamatan. (www.joglosemar.co , 6 Juli 2013). Kecamatan Tanon merupakan bagian dari

wilayah Kabupaten Sragen, berdasarkan pada data Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Tanon berjumlah 7.793 KK yang tersebar di 16 Desa yaitu:. Desa Karangasem, Desa Slogo, Desa Jono, Desa Gawan, Desa Kecik, Desa Padas Desa Gabungan, Desa Ketro, Desa Sambiduwur, Desa Karangtalun, Desa Gading, Desa Bonagung, Desa Kalikobok, Desa Tanon, Desa Suwatu dan Desa Pengkol. Jumlah ini cukup besar bila dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sragen.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji ketepatan sasaran program BLSM yang digulirkan oleh pemerintah. Sesuai dengan isu ketidak tepatan sasaran penyaluran BLSM di Kabupaten Sragen diatas, menurut hasil pengamatan dan survey peneliti, di Kecamatan Tanon terdapat ke salah sasaran penyaluran BLSM, beberapa warga yang terlihat mampu dari sisi ekonomi menjadi penerima dana BLSM sedangkan beberapa warga yang terlihat tidak mampu tidak menjadi rumah tangga sasaran BLSM. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka peneliti tertarik untuk membuktikan pengamatan tersebut dalam bentuk penelitian, yang pada akhirnya diharapkan akan bisa menjadi jawaban atas

keefektifan penyaluran program BLSM di Kecamatan Tanon.

Ketidak tepatan penentuan sasaran dan penerima BLSM disebabkan karena kurangnya akurasi data, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pemetaan sebaran penerima BLSM dan manfaat program BLSM terhadap masyarakat miskin di kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Di Kecamatan Tanon terdapat 7.793 RTS yang tersebar di 16 kelurahan. Meskipun sudah ada data *by name by address* penerima BLSM yang bisa dijadikan database penduduk miskin di kecamatan Tanon, namun data tersebut belum diolah sehingga sangat menyulitkan pengambil kebijakan untuk melihat sebaran penerima BLSM berdasarkan kelurahan dan kategori kemiskinan. Dengan demikian belum terlihat kelurahan mana yang merupakan kantong kemiskinan dan bagaimana sebaran penerima BLSM berdasarkan kategori kemiskinan. Sehingga untuk mempermudah dalam menganalisis perlu adanya peta untuk menggambarkan distribusi secara spasial. Diharapkan dari penelitian ini diperoleh informasi sebaran kemiskinan, sebaran penerima BLSM, efektivitas penyaluran program BLSM dan kemanfaatan program BLSM itu sendiri bagi rumah tangga sasaran dalam rangka penyempurnaan program pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen yang terdiri dari 16 Desa. Alasan pemilihan daerah ini karena pada saat pembagian BLSM Tahap I banyak terjadi ketidak akuratan data, dimana banyak warga yang dipandang mampu namun justru menjadi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dengan harapan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah terutama dalam program-program pengentasan kemiskinan di daerah penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan spasial. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proporsional random sampling* dan *simple random sampling* dengan populasi RTS penerima BLSM, dan 100 RTS sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komposisi Penduduk

Mayoritas penduduk Kecamatan Tanon bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 16.207 jiwa, pertanian disini meliputi perkebunan, peternakan dan

perikanan, juga termasuk petani dan buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tanon masih termasuk dalam kategori wilayah desa, karena sebagian besar penduduknya bekerja dibidang pertanian. Mata pencaharian terbanyak kedua yaitu perdagangan dan akomodasi sebesar 4670 jiwa, sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit di tekuni oleh penduduk Kecamatan Tanon adalah bidang listrik, gas dan air minum.

Persebaran Keluarga Miskin

Keluarga yang berhak menerima BLSM adalah keluarga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Untuk itu sebelum membahas tentang persebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima BLSM di Kecamatan Tanon tahun 2013, maka terlebih dahulu perlu diketahui persebaran Kepala Keluarga (KK) dan persebaran Kepala Keluarga miskin (KK miskin) sehingga kita akan mengetahui perbandingan antara KK, KK miskin dan RTS penerima BLSM.

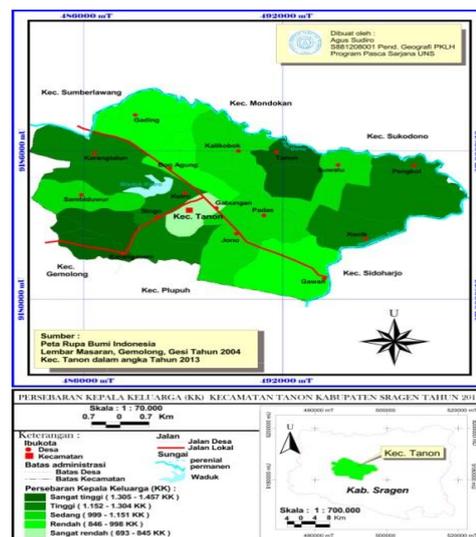
Persebaran KK

KK di Kecamatan Tanon sebanyak 17.686 KK yang tersebar di 16 Desa di Kecamatan Tanon. Persebaran KK terbanyak adalah di Desa Tanon dengan jumlah KK 1.400 atau 7.92% dari keseluruhan KK di Kecamatan Tanon, disusul kemudian Desa Karangasem dengan jumlah KK 1.318 KK atau 7.45 %,

sedangkan untuk persebaran KK terkecil adalah di Desa Gabungan yaitu sebesar 693 KK atau 3.92 %.

Pengklasifikasian KK sebagai berikut:

- Sangat rendah yaitu apabila jumlah KK antara 693KK - 845KK
- Rendah yaitu apabila jumlah KK antara 846 KK – 998 KK
- Sedang yaitu apabila jumlah KK antara 999 KK – 1.151 KK
- Tinggi yaitu apabila jumlah KK antara 1152 KK – 1.304 KK
- Sangat tinggi yaitu apabila jumlah KK antara 1.305- 1.457 KK



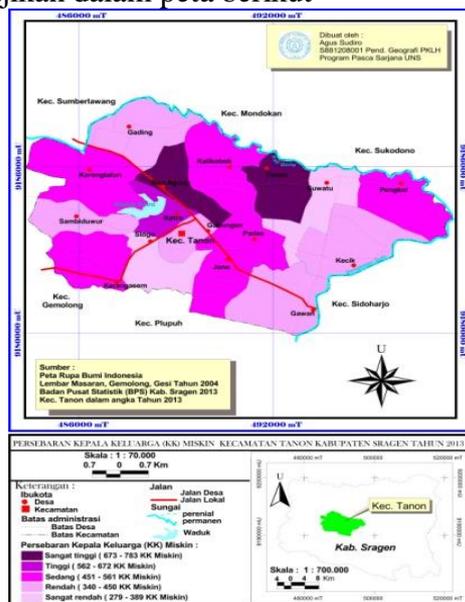
Desa Tanon dan Desa Karangasem yang merupakan desa dengan persebaran KK terbanyak memiliki luas wilayah 3,49 Km² atau 6,84% dari luas keseluruhan Kecamatan Tanon dengan luas pekarangan 0,74 Km² atau 21,24% dari keseluruhan luas Desa Tanon, sedangkan Desa Karangasem memiliki luas wilayah

3,36 Km² atau 6,59 % dari luas keseluruhan kecamatan Tanon dengan luas pekarangan 1,53 Km² atau 45,53 % dari luas keseluruhan Desa. Sedangkan untuk desa dengan persebaran KK sangat rendah adalah di Desa Gabungan dengan jumlah 693 KK, luas wilayah Desa Gabungan adalah 2,89 Km² atau 5,67% dari luas keseluruhan Kecamatan Tanon, dengan luas pekarangan 0,68 Km².

Persebaran KK Miskin

Persebaran penduduk miskin tersebar hampir merata di 16 Desa di Kecamatan Tanon.

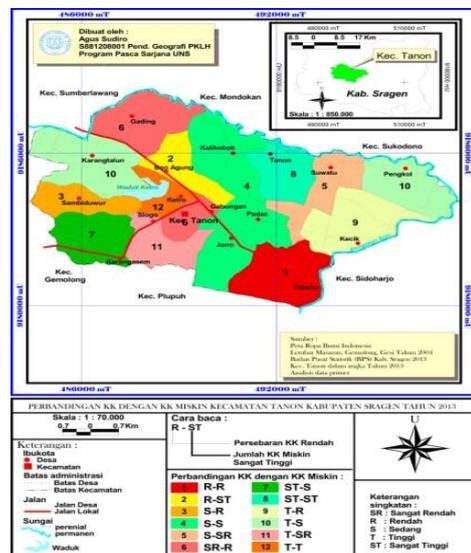
Persebaran KK miskin di Kecamatan Tanon tahun 2013 kemudian disajikan dalam peta berikut



Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Tanon yang sangat rendah tersebar di Desa Slogo dengan jumlah 314 KK miskin atau 4,03%, dan Desa Suwatu 279 KK miskin atau 3.60%. desa dengan kategori KK miskin sangat tinggi adalah

Desa Bonagung 830 KK miskin atau 10,65%, dan Desa Tanon 704 KK miskin atau 9.03%.

Untuk mengetahui perbandingan antara KK dan KK Miskin maka dilakukan *Overlay*(Tumpang susun) antara peta Persebaran KK dengan Peta persebaran KK Miskin di Kecamatan Tanon Tahun 2013. Hasil dari overlay antara ke dua peta tersebut disajikan dalam Peta Perbandingan KK, dan KK Miskin Kecamatan Tanon Tahun 2013



Rendahnya angka kemiskinan di Desa Slogo dan Desa Suwatu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah; kualitas sumber daya manusia: desa suwatu dan slogo memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, penduduk di desa suwatu dan slogo telah banyak yang mengenyam pendidikan sampai SMA di desa suwatu sebesar 5,7 % penduduknya telah menyelesaikan

pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi, sedangkan di desa slogo penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya sampai Perguruan Tinggi sebanyak 5,6%. Dari sisi mata pencaharian sebagian besar penduduk di desa slogo bermata pencaharian sebagai petani demikian juga penduduk di desa suwatu, akan tetapi petani di kedua desa ini bisa dikatakan memiliki modal yang lebih besar dibandingkan dengan di beberapa desa lainnya, disamping itu mereka juga biasanya menanam komoditas pertanian yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti cabe, melon dan bawang merah. rata-rata penduduk usia muda lebih memilih bekerja diluar kota atau bahkan keluar negeri untuk mendapat penghasilan yang lebih besar. Factor yang terakhir inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan di desa suwatu dan desa slogo lebih rendah dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Tanon.

Desa Bonagung dan desa tanon memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di desa-desa lainnya di kecamatan tanon. Factor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di kedua desa ini adalah: Desa Bonagung memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi yaitu sebesar 4.190 jiwa akan tetapi memiliki KK yang relative rendah

914 KK apabila kita ambil rata-rata maka dalam satu KK terdapat 5 jiwa, hal ini mengindikasikan banyaknya jumlah tanggungan keluarga demikian halnya di desa tanon memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yaitu sebanyak 4.608 jiwa jumlah penduduk di desa tanon merupakan yang terbesar di kecamatan tanon, dengan jumlah KK sebanyak 1400 KK. Sebagian besar penduduk di Desa Bonagung dan Desa tanon hanya menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SD, penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Perguruan Tinggi hanya sebesar 0.44% untuk Desa Bonagung dan 1.6% untuk Desa Tanon. Rata-rata mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani dan buruh tani, pertanian di desa Bonagung dan Desa Tanon sebagian besar masih kurang maju, factor keterbatasan modal menyebabkan petani menanam komoditas pertanian yang kurang memiliki nilai jual, seperti padi pada musim penghujan dan jagung pada musim kemarau, dimana pada saat panen raya kedua komoditas tersebut dihargai dengan harga yang sangat murah, belum lagi biaya produksi yang tinggi mulai dari penyiapan tempat sampai dengan panen. Hasil panen terkadang tidak bisa menutup untuk ongkos tersebut, dan walaupun ada keuntungannya hanya sedikit sekali.

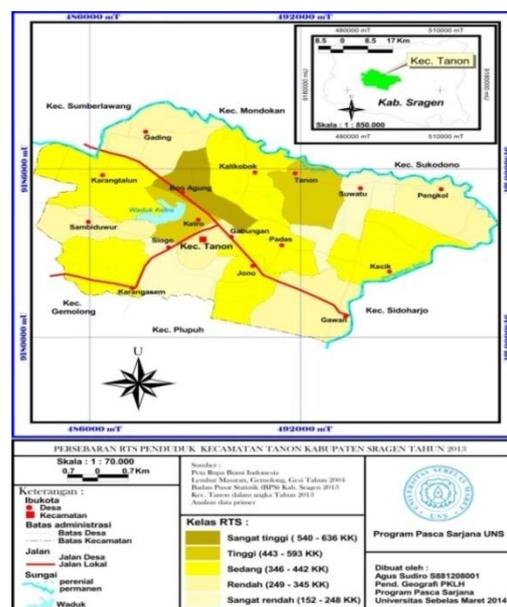
Persebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima BLSM

Rumah Tangga Sasaran penerima BLSM yang dimaksud disini adalah rumah tangga yang menjadi pemegang/penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu. KPS digunakan sebagai penanda Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mendapatkan manfaat P4S dan BLSM

Rumah Tangga Sasaran (RTS)penerima BLSM tahun 2013 di Kecamatan Tanon berjumlah 5.588 KK yang tersebar di 16 Desa dengan jumlah RTS terbesar adalah Desa Bonagung yaitu sebesar 632 KK atau 11.31%, sedangkan RTS penerima BLSM terendah adalah Desa Suwatu yaitu 152 KK atau 2.79%.

Penerima BLSM yang sangat rendah terdapat di Desa Suwatu yang terletak di timur laut Kecamatan Tanon, Penerima BLSM di Desa Suwatu sebesar 152 KK atau 2.32%, kemudian penerima BLSM terendah ke dua adalah Desa Slogo yang terletak di barat daya Kecamatan Tanon, penerima BLSM di Desa Slogo sebesar 233 KK atau 4,17%. Desa Bonagung yang terletak di sebelah barat laut Kecamatan Tanon merupakan Desa dengan RTS tertinggi se Kecamatan Tanon, jumlah RTS penerima BLSM adalah 632 KK atau 11.31% dari seluruh RTS penerima BLSM se Kecamatan Tanon.

RTS penerima BLSM di Kecamatan Tanon tahun 2013 disajikan dalam Peta berikut:



Jumlah KK, KK miskin dan RTS penerima BLSM di masing-masing desa

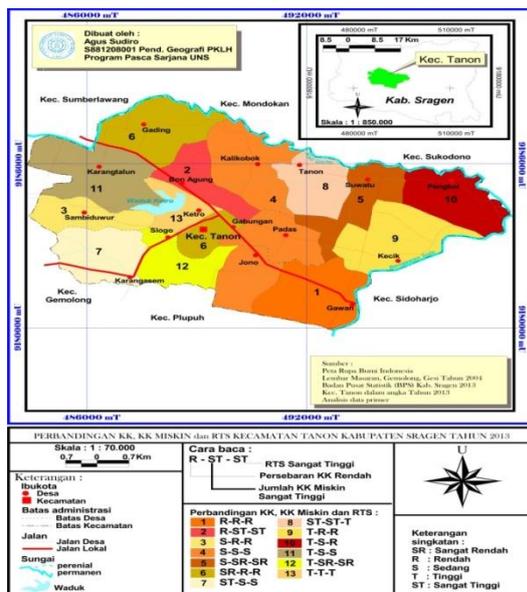
sangat bervariasi. Perbedaan RTS penerima BLSM di masing-masing desa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah KK miskin di desa yang bersangkutan. Jumlah KK miskin di Kecamatan Tanon tahun 2013 berjumlah 7.793 KK sedangkan RTS penerima BLSM hanya berjumlah 5.588, artinya tidak semua KK yang tergolong miskin menjadi penerima BLSM. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah KK miskin dengan RTS penerima BLSM adalah:

- a. Perbedaan siapa yang berhak menjadi RTS penerima BLSM dan siapa yang tidak berhak tidak dapat dilihat secara kasat mata, tanpa ada kondisi penentu lainnya.
- b. Adanya kemungkinan kesalahan pada saat pencacahan sehingga terjadi kesalahan data. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga yang berhak terlewatkan sebagai penerima manfaat, sementara keluarga yang tergolong mampu justru terdaftar sebagai penerima manfaat.
- c. Adanya dinamika sosial ekonomi yang terjadi dari tahun 2011-2013 yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, perpindahan, meninggal dan lain-lain.
- d. Dalam pelaksanaan PPLS 2011, berbeda dengan PPLS 2005 dan 2008, jika pada PSE 2005 dan PPLS 2008 BPS ditugasi mendata langsung Rumah Tangga Miskin (RTM), dan data dari BPS tersebut langsung digunakan oleh pemerintah untuk diberikan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan pada PPLS 2011 BPS ditugasi mendata 40% rumah tangga menengah kebawah, Data tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini ada di pemerintah pusat, yang terdiri dari sejumlah kementerian antara lain Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial juga Kementerian Keuangan juga BPS pusat. Hasil dari pendataan BPS kemudian diseleksi lagi oleh TNP2K dengan metodologi tertentu tanpa validasi ke lapangan.

KPS hanya diberikan kepada 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah, sehingga ada 15 % dari 40% penduduk dengan tingkat ekonomi terbawah yang tidak mendapatkan KPS

Tidak semua warga miskin yang di data oleh BPS pada PPLS 2011 berhak menjadi penerima BLSM, karena TNP2K hanya mengambil penduduk dengan kelas sosial ekonomi 25% terbawah sebagai

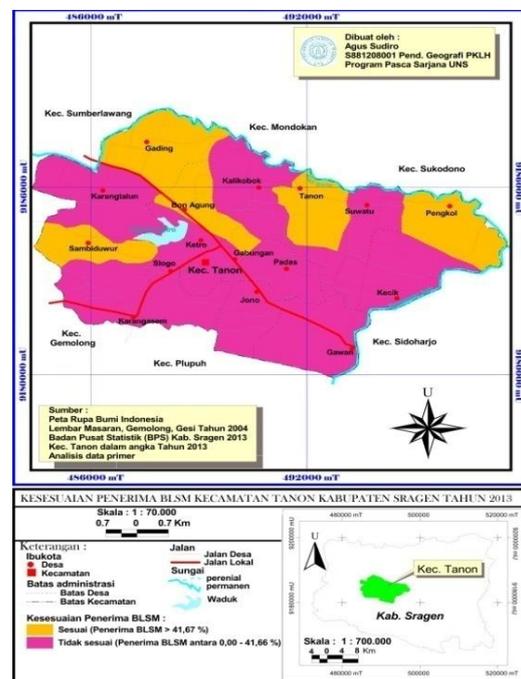
sasaran penerima kompensasi BBM tersebut. Beberapa kesalah sasaran penerima BLSM dilapangan menimbulkan kecemburuan sosial di daerah penelitian. Berdasarkan wawancara langsung dengan petugas kantor pos Tanon sebagai penyalur dana BLSM, mengungkapkan bahwa ada beberapa warga yang memprotes penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran.



Berdasarkan uraian dan distribusi persebaran yang digambarkan peta Perbandingan antara KK, KK miskin dan RTS penerima BLSM diatas diketahui bahwa setiap desa memiliki jumlah penerima BLSM yang berbeda-beda. Perbedaan jumlah RTS penerima BLSM ini disebabkan oleh perbedaan jumlah keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Keberadaan keluarga miskin sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga tersebut, jenis pekerjaan dan

jumlah jam kerja, pendidikan keluarga serta jumlah tanggungan keluarga.

RTS layak BLSM adalah RTS yang termasuk dalam kelompok Keluarga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin. Sedangkan RTS tidak layak BLSM adalah RTS yang tidak termasuk dalam kelompok Keluarga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin. Dari hasil penelitian terhadap 100 responden, terdapat 37 KK atau (37%) yang layak BLSM dan 63 KK atau (63%) yang tidak layak BLSM



Efektivitas penyaluran BLSM dalam arti penyaluran BLSM yang menysar kepada keluarga hampir miskin, miskin, dan sangat miskin dapat diketahui dengan cara membandingkan kriteria keluarga miskin dengan 14 kriteria penilaian penerima BLSM dan konsep keluarga miskin menurut BPS. BPS

menarik garis kemiskinan dengan pendekatan pengeluaran yaitu besarnya pendapatan yang dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi makanan setara 2.100 kalori perkapita perhari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan lainnya seperti sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi kalori perkapita perhari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan lainnya seperti sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Untuk membandingkan penerima BLSM yang sesuai dengan kriteria BLSM dan konsep kemiskinan menurut BPS maka diperlukan perhitungan pendapatan per RTS per bulan yang digunakan untuk memenuhi kecukupan jumlah kalori dan kebutuhan pokok yang lainnya dari pendapatan tersebut. Dari data yang telah diperoleh pada saat wawancara dapat diketahui penghasilan paling tinggi adalah sebesar Rp3.000.000,- dan pendapatan terendah adalah Rp0,- atau tidak punya pendapatan sama sekali.

Hampir separuh penerima BLSM adalah penduduk sangat miskin yaitu 55 RTS atau (55%) , kategori miskin sebanyak 19 KK atau (19%), kategori hampklir miskin 2 KK atau (2%), dan kategori tidak miskin sebanyak 24 KK atau 24%. Apabila dinyatakan layak atau tidak layak BLSM maka, 76 KK (76%) layak

menerima BLSM dan 24 K(24%) tidak layak BLSM.

Secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara ke dua kriteria penentuan keluarga miskin, maka nampak sekali terjadi perbedaan criteria miskin layak BLSM dan tidak layak BLSM. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan dua indikator kemiskinan tersebut. Indikator berdasarkan 14 kriteria penerima BLSM secara garis besar telah mewakili penghasilan KK, kecukupan kebutuhan pangan, sandang, papan, sarana/fasilitas, dan kepemilikan asset.

Keluarga yang layak menerima BLSM menurut kecukupan kalori, terdapat 76 KK dari 100 KK. Dengan demikian penerima BLSM di Kecamatan Tanon tahun 2013 dinyatakan efektif dengan nilai keefektivan 76%.

Kemanfaatan BLSM Bagi Rumah Tangga Sasaran

Pendapatan RTS

Pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapatan Kepala Keluarga RTS BLSM ditambahkan dengan dana yang berasal dari BLSM sebesar Rp. 150.000 per bulan. Pendapatan RTS tersebut kemudian diklasifikasikan lagi kedalam kelas sosial ekonomi RTS dengan tetap mempergunakan pendekatan

kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*) BPS.

Berdasarkan klasifikasi tingkat pendapatan tersebut diketahui bahwa kategori kelas kemiskinan terbanyak di Kecamatan Tanon tahun 2013 adalah pada kategori sangat miskin sebanyak 55 KK (55%), disusul kemudian pada kategori tidak miskin sebanyak 24 KK (24%), kategori miskin sebanyak 19 KK (19%), dan kategori hampir miskin sebanyak 2 KK (2%).

Setelah mengetahui klasifikasi kemiskinan, maka diperlukan matching data antara pendapatan dengan daya beli RTS, daya beli yang dijadikan ukuran disini adalah daya beli beras yang dianggap mewakili kebutuhan pokok bagi RTS BLSM di Kecamatan Tanon.

Sebanyak 6 RTS (6%) yang termasuk kategori sangat miskin tidak bisa mempertahankan daya beli, sedangkan 49 RTS (49%) yang termasuk kategori sangat miskin cenderung bisa mempertahankan daya belinya. 16 RTS (32%) yang tergolong miskin mampu mempertahankan daya beli, sedangkan 3 RTS (3%) yang termasuk kategori miskin ternyata rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. 2 KK (2%) yang termasuk kategori hampir miskin mampu mempertahankan daya beli. 24 RTS (24%) yang termasuk kategori tidak miskin, tidak mempunyai

kerentanan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok karena berhasil mempertahankan daya beli terhadap beras.

Harga Beras

Harga Beras yang dimaksudkan disini adalah harga beras yang dihadapi oleh RTS periode Juli-Agustus 2013, yaitu rentang waktu antara pembagian BLSM Tahap I dan Tahap II.

Dari 100 RTS penerima BLSM terdapat 9 RTS yang tidak mampu mempertahankan daya beli terhadap beras, sementara 91 RTS mampu mempertahankan daya beli terhadap beras. 9 RTS yang tidak mampu mempertahankan daya beli terhadap beras ini meliputi 2 RTS pada level harga beras Rp. 7.000, 1 RTS pada level harga beras Rp.7.200, 5 RTS pada level harga beras Rp. 7.500, dan 1 RTS pada level harga beras Rp. 8500. Sementara 91 RTS yang mampu mempertahankan daya beli berasnya meliputi 24 RTS pada level harga beras Rp. 7.000, 1 RTS pada level harga beras Rp. 7.200, 2 RTS pada level harga beras Rp. 7.300, 32 RTS pada level harga beras Rp. 7.500, 1 RTS berada pada level harga beras Rp. 7.600, 27 RTS berada pada level harga beras Rp. 8.000, dan 4 RTS berada pada level harga beras Rp. 8.500.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian dana BLSM sangat dirasakan manfaatnya oleh

sebagian besar RTS, hal ini bisa dilihat dari jumlah RTS yang dapat mempertahankan daya belinya terhadap beras lebih banyak daripada RTS yang tidak dapat mempertahankan dayabelinya terhadap beras.

Gaya Hidup

Gaya hidup menurut *Kotler (2002 : 192)* adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan gaya hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana para RTS penerima BLSM di Kecamatan tanon mengalokasikan dana BLSM yang mereka terima, disini terdapat dua gaya hidup yaitu RTS dengan gaya hidup yang baik artinya RTS penerima BLSM ini mempergunakan dana BLSM untuk mencukupi kebutuhan pokok, yaitu untuk membeli beras. Sedangkan yang dimaksud RTS dengan gaya hidup yang tidak baik adalah RTS yang mempergunakan dana BLSM yang diterima untuk selain kebutuhan pokok, misalnya untuk membeli kambing, membeli TV, dan lain-lain.

Sebanyak 89 RTS (89%) mempunyai gaya hidup yang baik, artinya dana BLSM yang diterima dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, rata-rata

digunakan untuk membeli beras dan yang lainnya digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya. 1 RTS (1%) mempergunakan dana BLSM untuk berobat, 1 RTS (1%) mempergunakan dana BLSM untuk kulakan, 5 RTS (5%) mempergunakan dana BLSM untuk membeli kambing, 1 RTS (1%) mempergunakan dana BLSM untuk membeli kompor, 1 RTS (1%) mempergunakan dana BLSM untuk membeli pupuk, 1 RTS (1%) mempergunakan dana BLSM untuk membeli televisi, dan 2 RTS (2%) mempergunakan dana BLSM untuk merenovasi rumah.

Dari 3 indikator yang mempengaruhi kemanfaatan dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat dengan penghasilan kurang dari Rp. 700.000/ bulan merasa sangat terbantu dengan adanya program BLSM, karena dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu mereka untuk mempertahankan daya beli terhadap kebutuhan pokok terutama beras.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 17.686 KK di kecamatan Tanon, sebanyak 7.793 KK merupakan KK miskin, dengan kategori sangat miskin 1.413 KK (18,13%), miskin 1.393 KK

- (17,87%), hampir miskin 2.423 KK (31,10%) dan rawan melarat 2.564 KK (32,90). KK miskin di Kecamatan Tanon terbanyak terdapat di Desa Bonagung yaitu sebesar 830 KK, dan terendah terdapat di Desa Suwatu yaitu sebesar 279 KK.
2. Dari 7.793 KK yang tergolong miskin, 5.588 KK adalah RTS penerima BLSM. RTS penerima BLSM diklasifikasikan dalam lima kategori, Kategori rendah adalah Desa Suwatu 152 RTS, dan Desa Slogo 233 RTS. Kategori rendah adalah Desa Gawan 261 RTS, Desa Kecik 296 RTS, Desa Gabugan 264 RTS, Desa Gading 256 RTS, Desa Sambiduwur 342 RTS. Kategori sedang adalah Desa Karangasem 349 RTS, Desa Jono 409 RTS, Desa Padas 380 RTS, Desa Karangtalun 359 RTS, Desa kalikobok 370 RTS, dan Desa Pengkol 337 RTS.

Kategori tinggi adalah Desa Ketro 446 RTS dan Desa Tanon 502 RTS. Sedangkan untuk kategori sangat tinggi adalah Desa Bonagung yaitu sebesar 632 RTS.

3. Melalui perhitungan 14 kriterianya miskin didapatkan 37 RTS merupakan RTS layak BLSM, sedangkan menurut kecukupan kalori 76 RTS layak menerima BLSM. Dengan demikian penerima BLSM di Kecamatan Tanon tahun 2013 dinyatakan efektif dengan nilai keefektifan 76%.
4. Dengan mempergunakan indikator pendapatan, harga beras, dan gaya hidup diketahui bahwa RTS penerima BLSM dapat merasakan manfaat dari program tersebut, tingkat kemanfaatan pada variabel pendapatan dan daya beli terhadap beras 91%, serta gaya hidup 89%.

REFERENSI

Anonim “*Evaluasi dan Pengendalian Raskin dan P4S*” Dalam www.kemsos.go.id. Diakses agustus 2013

Anonim “*Bersama-Sama Selamatkan Uang Rakyat Mencegah Menggelembungnya Subsidi Bbm Yang Tidak Adil Dan Salah Sasaran*” dalam

www.sosialisasi-bbm.wapresri.go.id.

Diakses Juli 2013

Anonim “*Salah Sasaran, Ribuan Warga Penerima BLSM Dialihkan*”. 28 Juni 2013.dalam Joglosemar.co. Diakses Juli 2013.

Heny Rahayu. 2011. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin di Kota*

- Madiun. Tesis.Surakarta :Universitas
Sebelas Maret Surakarta
- Iqbal, Hasbi. 2008. *Implementasi
Kebijakan Program Bantuan Langsung
Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten
Kudus*, Tesis. Program Pascasarjana
Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro, Semarang
- Jenny A. Roffika.2008. *Analisis
Probabilitas Kemanfaatan Dana
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi
Rumah Tangga Miskin (RTM) Di
Kelurahan Selomoro Kecamatan
Jenawi Kabupaten Karanganyar
Tahun 2008*.
Skripsi.Surakarta:Universitas Sebelas
Maret Surakarta
- Kementrian Sosial Republik Indonesia dan
Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
2013. *Panduan TKSK: Program
Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial (P4S) dan
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) Tahun 2013*.
- Kotler.Philip.2002. *Manajemen
Pemasaran*. Edisi Milenium,Jilid
1.Jakarta:Prenhelindo
- Moleong, Lexy.1995. *Metode Penelitian
Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
- Pabundu, Tika. 1997. *Metode Penelitian
Geografi*. Jakarta. Gramedia Pustaka
Utama
- Rindarjono, Muh.Gamal.2012. *”Slum”
Kajian Permukiman Kumuh Dalam
Perspektif Spasial*.Yogyakarta:Media
Perkasa
- TNP2K, 2013.*Solusi Masalah Kepesertaan
dan Pemutaakhiran data Penerima
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)*,Tim
Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan
Bakar Minyak.Jakarta Pusat.
- Wibawa.Sholeh.2010.*Pemetaan Penerima
Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
Kecamatan Gatak Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008*.
Skripsi.Surakarta: Universitas Sebelas
Maret Surakarta